

Indikator

KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN KONawe SELATAN 2023



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KONawe SELATAN

Indikator
**KESEJAHTERAAN
R A K Y A T**
KABUPATEN KONawe SELATAN 2023

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KONAWE SELATAN 2023

No. Publikasi : 74050.2337
Katalog : 4102004.7405

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 70 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan

Desain Kover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan

Dicetak oleh:

UD. Syahid, Kendari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan.

TIM PENYUSUN

Pengarah

Hasyuril Hadini, S.E.

Penanggung Jawab

Haeruddin, S.P., M.M.

Penyunting

Haeruddin, S.P., M.M.

Penulis Naskah

Eryansal, A.Md.Stat.

Pembuat Kover

Eryansal, A.Md.Stat.

Penata Letak

Eryansal, A.Md.Stat.

<https://kampuselka.com/ps-go.id>


KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Konawe Selatan 2023 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe Selatan yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan penduduk Kabupaten Konawe Selatan antar waktu. Data yang digunakan bersumber dari BPS maupun Dinas atau Badan terkait. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan dan untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, serta Kemiskinan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Andoolo, Desember 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Konawe Selatan



HASYURIL HADINI, S.E.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	ix
Bab 1. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang dan Ruang Lingkup	3
1.2. Tujuan Penulisan.....	4
1.3. Jenis dan Sumber Data	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
Bab 2. Kependudukan	7
2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk & Rasio Jenis Kelamin	10
2.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....	11
2.3. Angka Beban Ketergantungan.....	13
2.4. Penduduk Menurut Usia Perkawinan Pertama	14
2.5. Penggunaan Alat/Cara KB.....	16
Bab 3. Kesehatan.....	19
3.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk.....	22
3.2. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan.....	23
Bab 4. Pendidikan	27
4.1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.....	30
4.2. Tingkat Pendidikan	32
4.3. Tingkat Partisipasi Sekolah	34
4.4. Kualitas Pelayanan Pendidikan.....	36
Bab 5. Ketenagakerjaan	39
5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	41
5.2. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan	43
5.3. Lapangan Usaha	44
5.4. Status Pekerjaan	45

Bab 6. Taraf dan Pola Konsumsi	47
6.1. Pengeluaran Rumah Tangga	49
6.2. Konsumsi Energi dan Protein.....	51
Bab 7. Perumahan dan Lingkungan	53
7.1. Sumber Air Pada Rumah Tangga	55
7.2. Fasilitas Rumah Tinggal	56
7.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal.....	58
Bab 8. Kemiskinan.....	61
7.1. Perkembangan Penduduk Miskin	63
7.2. Garis Kemiskinan (GK)	64
Bab 9. Penutup.....	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Bab 2. Kependudukan	7
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Konawe Selatan, 2020-2022	10
Tabel 2.2. Kepadatan dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, 2022	12
Tabel 2.3. Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan Penduduk Konawe Selatan, 2020-2022	14
Tabel 2.4. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan di Konawe Selatan, 2021-2023	15
Tabel 2.5. Persentase Wanita Pernah Kawin Berumur 15 - 49 Tahun menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB di Konawe Selatan, 2021-2023	17
Bab 3. Kesehatan	19
Tabel 3.1. Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Konawe Selatan, 2019-2023	23
Tabel 3.2. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Menurut Karakteristik Tempat Melahirkan dan Penolong Kelahiran, 2020-2023	24
Tabel 3.3. Persentase Penduduk Konawe Selatan yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Jalan, 2023	25
Tabel 3.4. Jumlah Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk, 2019-2022	26
Bab 4. Pendidikan	27
Tabel 4.1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, 2019-2023	31
Tabel 4.2. Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan, 2023	33
Tabel 4.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin, 2023	35
Tabel 4.4. Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Sekolah, 2021/2022 dan 2022/2023	38

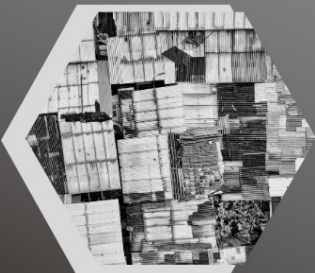
Bab 5. Ketenagakerjaan	39
Tabel 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2019-2023	42
Tabel 5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2019-2023.....	43
Tabel 5.3. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha, 2022 dan 2023	44
Tabel 5.4. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2023.....	46
Bab 6. Taraf dan Pola Konsumsi	47
Tabel 6.1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2023	50
Tabel 6.2. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan Menurut Kuintil Pengeluaran (Rupiah), 2023	51
Tabel 6.3. Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Menurut Kuintil Pengeluaran, 2023.....	52
Bab 7. Perumahan dan Lingkungan	53
Tabel 7.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2022-2023	59
Bab 8. Kemiskinan.....	61
Tabel 8.1. Perkembangan Penduduk Miskin Di Kabupaten Konawe Selatan, 2019-2023	64
Tabel 8.2. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan), 2018-2022	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Bab 3. Kesehatan.....	19
Gambar 3.1. Umur Harapan Hidup Konawe Selatan, 2020-2023 ..	22
Bab 7. Perumahan dan Lingkungan	53
Gambar 7.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Untuk Keperluan Sehari-hari, 2023	56
Gambar 7.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2023	58

<https://konselkab.bps.go.id/>

1 PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang dan Ruang Lingkup

Sejahtera idealnya dapat diartikan sebagai kondisi dimana orang-orang di suatu wilayah hidup dengan makmur, hidup dengan nyaman, sehat, dan berkecukupan. Semakin sejahtera suatu wilayah, maka semakin baik pula kualitas hidup di wilayah tersebut. Untuk mencapai kondisi itu diperlukan kemampuan dari setiap individu dan didorong oleh pemerintah di wilayah tersebut.

Kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan dengan melakukan pembangunan yang merata. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terus melakukan pembangunan yang lebih baik dari waktu ke waktu untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Konawe Selatan dilakukan untuk mewujudkan derajat kehidupan yang lebih sehat, layak, dan manusiawi.

Pembangunan tanpa pengukuran hasil hanya akan menjadi agenda rutin dan menjadi tidak berarti. Perencana pembangunan dan pengambil kebijakan daerah perlu mengetahui hasil dari pembangunan yang telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan yang telah dicapai. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap berbagai kinerja pembangunan, agar kebijakan yang akan diambil pada masa mendatang dapat mencapai sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum sekaligus menjadi contoh bagi pembangunan di wilayah lain.

Evaluasi terhadap hasil pembangunan dapat dilakukan dengan melihat indikator kesejahteraan rakyat, sebagai sasaran dari berbagai program pembangunan. Apabila indikator yang ada menunjukkan kesejahteraan rakyat meningkat, maka dapat diasumsikan bahwa kinerja pembangunan relatif sudah mencapai sasaran yang dituju, demikian pula sebaliknya. Indikator kesejahteraan rakyat yang dimaksud antara lain dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat secara umum, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, kondisi perumahan, dan sebagainya.

Kesejahteraan rakyat memiliki dimensi yang sangat luas, sementara data yang tersedia masih terbatas, sehingga tidak semua aspek yang

mendukung kesejahteraan rakyat dibahas dalam publikasi ini. Aspek-aspek kesejahteraan yang akan diulas adalah aspek kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendapatan, perumahan dan aspek lainnya.

1.2. Tujuan Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang perkembangan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan sosial, sebagai dampak pembangunan yang telah dilakukan.
2. Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk perencanaan pembangunan selanjutnya.

1.3. Jenis dan Sumber Data

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 menyajikan informasi dalam bentuk ulasan, tabel-tabel, dan gambar. Pada setiap bab disertakan ulasan, sehingga dapat diperoleh gambaran informasi yang terkait dengan topik bahasan pada bab yang bersangkutan.

Sumber data utama penulisan ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk, ditambah data penunjang lainnya yang berasal dari catatan administrasi kementerian/Instansi pemerintah di luar BPS sebagai sumber data sekunder diantaranya Dinas Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dll.

a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Kegiatan Susenas secara nasional dilakukan setiap tahun. Survei ini mengumpulkan data yang mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi, seperti kependudukan, kesehatan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, kriminalitas dan perumahan serta lingkungan. Karakteristik penting kependudukan seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, hubungan anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga dan pendidikan

dikumpulkan melalui pertanyaan data pokok (kor) setiap tahun. Data yang lebih rinci, seperti konsumsi rumah tangga, perumahan, kesehatan, dan sosial budaya dikumpulkan melalui data sasaran (modul) yang dikumpulkan secara periodik, tiga tahun sekali.

b. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang secara nasional dilakukan setiap tahun. Survei ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja, jumlah orang yang bekerja, jumlah orang yang mencari kerja, dan sebagainya.

c. Sensus Penduduk

Sensus penduduk merupakan kegiatan nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang penduduk dan rumah tangga di seluruh Indonesia. Sensus penduduk dilakukan secara berkala setiap 10 tahun sekali, biasanya di tahun yang berakhir 0, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Sensus Penduduk mencakup semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia pada saat pencacahan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali korps diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Konawe Selatan 2023 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 menyajikan tentang Pendahuluan
- Bab 2 menyajikan tentang Kependudukan
- Bab 3 menyajikan tentang Kesehatan
- Bab 4 menyajikan tentang Pendidikan
- Bab 5 menyajikan tentang Ketenagakerjaan
- Bab 6 menyajikan tentang Taraf dan Pola Konsumsi

- Bab 7 menyajikan tentang Perumahan dan Lingkungan
- Bab 8 menyajikan tentang Kemiskinan
- Bab 9 menyajikan Penutup

<https://konselkab.bps.go.id>

2

KEPENDUDUKAN

PENDAHULUAN



KEPENDUDUKAN



KESEHATAN



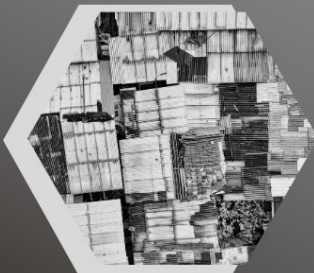
PENDIDIKAN



KETENAGAKERJAAN



TARAF DAN POLA
KONSUMSI



PERUMAHAN DAN
LINGKUNGAN



KEMISKINAN

PENUTUP

Penduduk adalah komponen utama dalam pembangunan, karena perannya yang menjadi subjek sekaligus sebagai objek dalam pembangunan. Selain sebagai pelaksana, penduduk juga merupakan sasaran akhir dari semua target program pembangunan. Oleh karena itu penting untuk memperhitungkan data kependudukan dalam menentukan arah perencanaan kebijakan di masa yang akan datang.

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan angka kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Komposisi penduduk dengan penduduk usia produktif yang lebih rendah akan menciptakan angka beban ketergantungan yang tinggi. Kondisi tersebut nantinya akan kembali membawa Indonesia kepada masalah baru yang lainnya. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki

kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk yang besar menjadi salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Indonesia, lebih khusus di Kabupaten Konawe Selatan. Jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan tercatat sebesar 317.826 jiwa atau sekitar 11,76 persen dari total penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 2.701.661 jiwa pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020, jumlah penduduk Konawe Selatan mengalami peningkatan sekitar 3,02 persen. Dengan kata lain, selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan telah mengalami pertambahan jumlah penduduk sebesar 9.302 jiwa.

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan menjadi wilayah dengan persentase jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kota Kendari. Pada tahun yang sama jumlah penduduk Kota Kendari mencakup sekitar 13,20 persen dari total penduduk Sulawesi Tenggara. Besarnya proporsi penduduk Konawe Selatan bagi Sulawesi Tenggara tersebut memang sejalan dengan besarnya luas wilayah Konawe Selatan. Konawe Selatan yang memiliki 25 kecamatan merupakan kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Konawe yang ada di Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Konawe Selatan, 2020-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2020 ¹	308 524	(1,15)	105,63
2021 ²	312 674	1,35	105,42
2022 ²	317 826	1,65	105,21

Sumber: ¹BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 (September)

²BPS, Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Salah satu indikator demografi yang dapat digunakan untuk melihat keterbandingan penduduk laki-laki dan perempuan adalah rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin menggambarkan banyaknya penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan. Pada Tabel 2.1, dapat dilihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2022 tercatat sebesar 105,21. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat 105 orang hingga 106 orang penduduk berjenis kelamin laki-laki di setiap 100 orang penduduk berjenis kelamin perempuan.

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Konawe Selatan pada tahun 2022 tercatat sebesar 1,65 persen, meningkat dibanding tahun 2021 yang tercatat tumbuh sebesar 1,35 persen.

2.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi di Kabupaten Konawe Selatan yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk juga terjadi di Kabupaten Konawe Selatan. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

Selama ini persebaran penduduk di Kabupaten Konawe Selatan tidak merata antar kecamatan. Pada tahun 2022 penduduk terbanyak berada di wilayah Kecamatan Tinanggea sebanyak 25.716 jiwa atau 8,09 persen dari total penduduk Kabupaten Konawe Selatan. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya berada di Kecamatan Konda sebesar 7,07 persen dari total penduduk Kabupaten Konawe Selatan, dan Kecamatan Ranomeeto sebesar 6,96 persen dari total penduduk Kabupaten Konawe Selatan.

Jika dilihat dari kepadatan penduduk di setiap kecamatan, Kecamatan Ranomeeto menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk

tertinggi. Pada tahun 2022, Kecamatan Ranomeeto tercatat sebanyak 244-245 jiwa per km². Sementara itu, Kecamatan Laonti merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah, yakni hanya ditempati oleh 28-29 jiwa per km².

Tabel 2.2. Kepadatan dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, 2022

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Persentase Penduduk	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tinanggea	80,27	8,09	25 716
2. Lalembu	109,04	5,07	16 127
3. Andoolo	91,87	3,43	10 901
4. Buke	81,66	4,66	14 811
5. Andoolo Barat	113,36	2,84	9 031
6. Palangga	88,14	4,82	15 315
7. Palangga Selatan	71,11	2,41	7 654
8. Baito	61,31	2,93	9 302
9. Lainea	50,07	3,23	10 269
10. Laeya	79,29	6,90	21 942
11. Kolono	34,83	3,73	11 853
12. Kolono Timur	44,59	1,75	5 574
13. Laonti	28,02	3,30	10 473
14. Moramo	63,67	5,09	16 189
15. Moramo Utara	57,76	2,90	9 227
16. Konda	176,76	7,07	22 471
17. Wolasi	36,80	1,84	5 848
18. Ranomeeto	244,97	6,96	22 111
19. Ranomeeto Barat	119,38	2,61	8 297
20. Landono	79,18	2,73	8 691
21. Mowila	115,80	4,48	14 231
22. Sabulakoa	84,62	1,77	5 630
23. Angata	58,44	5,41	17 187
24. Benua	83,07	3,50	11 124
25. Basala	161,13	2,47	7 852
Konawe Selatan	75,00	100,00	317 826

Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Kepadatan penduduk sebagian besar kecamatan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Kepadatan penduduk pada wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Kendari jauh lebih tinggi dibanding dengan wilayah lainnya. Hal ini seperti yang terjadi pada Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Konda karena memiliki akses yang cukup mudah menuju ibukota provinsi dan sejumlah area publik seperti bandara, terminal, dan rumah sakit sehingga banyak berdiri daerah pemukiman baru (perumahan, asrama, dan lain sebagainya).

2.3. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Pada tahun 2021 angka beban tanggungan Kabupaten Konawe Selatan sebesar 48,61 persen, hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 48-49 penduduk usia tidak produktif. Sampai pada tahun 2023, angka beban tanggungan penduduk produktif berada pada posisi 49,19 persen.

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka

banyak yang tidak bekerja. Mereka kategori usia produktif tapi tidak dapat dimanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai konsumsi makanan dan non makanan penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) maupun yang tidak produktif lagi (usia 65 tahun keatas). Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.3. Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan Penduduk Konawe Selatan, 2020-2022

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun Keatas	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2021 ¹	27,79	67,29	4,93	48,61
2022 ¹	27,47	67,43	5,10	48,29
2023 ²	27,71	67,03	5,26	49,19

Sumber: ¹BPS, Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

²BPS, Diolah dari Hasil Susenas

Pada Tabel 2.3. dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Konawe Selatan didominasi oleh penduduk usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Konawe Selatan menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) kembali bertambah dari 5,10 persen pada tahun 2022 menjadi 5,26 persen pada tahun 2023.

2.4. Penduduk Menurut Usia Perkawinan Pertama

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat

dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Tabel 2.4. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan di Konawe Selatan, 2021-2023

Tahun	Status Perkawinan		
	Belum Kawin	Kawin	Cerai*
(1)	(2)	(3)	(4)
2021	30,79	62,67	6,54
2022	32,09	60,41	7,50
2023	33,85	58,88	7,27

Catatan: * Termasuk cerai hidup dan cerai mati

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2023, komposisi penduduk menurut status perkawinan menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok laki-laki usia 10 tahun ke atas lebih besar dibanding perempuan pada kelompok usia yang sama, yakni 38,32 persen berbanding 29,37 persen. Sementara itu penduduk yang berstatus kawin pada kelompok perempuan sebesar 59,32 persen, dibandingkan laki-laki yang hanya 58,45 persen. Begitu pula penduduk yang berstatus cerai, kelompok perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, baik yang cerai hidup maupun cerai mati. Sekitar 11,31 persen perempuan kelompok usia diatas 10 tahun berstatus janda (status perkawinannya cerai mati atau cerai

hidup). Sedangkan laki-laki yang berstatus duda (status perkawinannya cerai mati atau cerai hidup) sejumlah 3,24 persen pada kelompok usia yang sama.

Persentase penduduk berstatus kawin cenderung menurun selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021, persentase penduduk berstatus kawin sebesar 62,67 persen, menurun menjadi 60,41 persen tahun 2022 dan kembali menurun ditahun 2023 menjadi sebesar 58,88 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang pernah bercerai (cerai hidup dan cerai mati) cenderung fluktuatif selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, penduduk yang pernah bercerai sebesar 6,54 persen, kemudian meningkat menjadi sebesar 7,50 persen ditahun 2022. Hingga tahun 2023 menurun kembali menjadi 7,27 persen.

2.5. Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, alat/cara KB dibedakan menjadi MKJP atau Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (meliputi: tubektomi/MOW, vasektomi/MOP, IUD dan susuk KB/implant), Non MKJP (meliputi: suntikan KB, pil KB, kondom/karet KB, intravag/kondom wanita/diafragma) dan cara tradisional. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis,

efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Tabel 2.5. Persentase Wanita Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB di Konawe Selatan, 2021-2023

Tahun	Status Penggunaan Alat/Cara KB		
	Pernah Menggunakan	Sedang Menggunakan	Tidak Pernah Menggunakan
(1)	(2)	(3)	(4)
2021	11,59	56,22	32,19
2022	18,24	51,53	30,24
2023	20,64	56,04	23,32

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas

Berdasarkan Hasil Susenas tahun 2023, persentase wanita berusia 15-49 tahun dan berstatus kawin yang pernah menggunakan alat/cara KB sebesar 20,64 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan angka tahun 2022 yaitu 18,24 persen. Sementara, wanita berusia 15-49 tahun dan berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB pada tahun 2023 sebesar 56,04 persen juga lebih besar dibandingkan tahun 2022 sebesar 51,53 persen. Sedangkan yang sama sekali tidak pernah menggunakan alat/cara KB pada tahun 2023 sebesar 23,32 persen lebih sedikit dibandingkan tahun 2022 sebesar 30,24 persen.

3 KESEHATAN

PENDAHULUAN



KEPENDUDUKAN



KESEHATAN



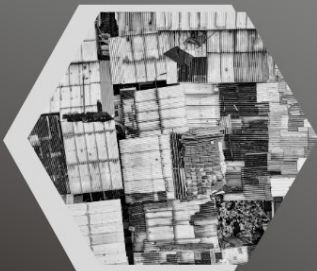
PENDIDIKAN



KETENAGAKERJAAN



TARAF DAN POLA
KONSUMSI



PERUMAHAN DAN
LINGKUNGAN



KEMISKINAN

PENUTUP

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

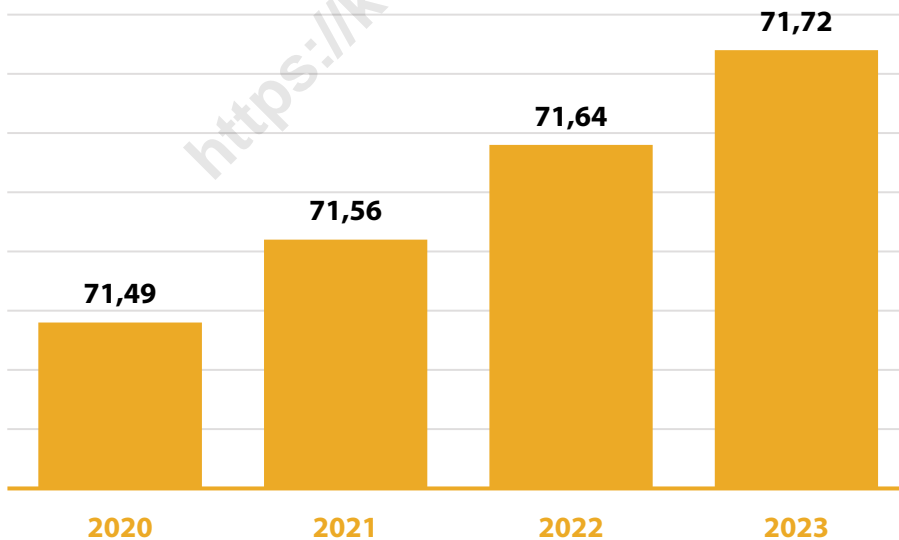
Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Umur Harapan Hidup, Angka Kesakitan Penduduk, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

3.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya angka umur harapan hidup penduduknya. Sumber data perkembangan umur harapan hidup, pada gambar 3.1 dibawah ini merujuk pada Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023. Semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Konawe Selatan, telah diiringi dengan peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH). Dalam 4 tahun terakhir, Kabupaten Konawe Selatan tercatat mengalami kenaikan angka sebesar 0,32 poin. Peningkatan angka harapan hidup ini karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Gambar 3.1. Umur Harapan Hidup Konawe Selatan, 2020-2023



Sumber: BPS, Umur Harapan Hidup dari hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik

dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas tahun 2023 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Konawe Selatan mengalami penurunan menjadi 10,23 persen. Dimana, angka Kesakitan penduduk berjenis kelamin perempuan lebih tinggi dari penduduk berjenis kelamin laki-laki, yakni masing-masing sekitar 10,23 persen untuk perempuan dan 12,09 persen untuk laki-laki.

Tabel 3.1. Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Konawe Selatan, 2019-2023

Tahun	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	17,07	18,59	17,82
2020	15,90	15,44	15,68
2021	19,16	8,32	13,86
2022	19,67	19,47	19,57
2023	10,23	12,09	11,15

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas

3.2. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi

standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa/kelurahan.

Tabel 3.2. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Menurut Karakteristik Tempat Melahirkan dan Penolong Kelahiran, 2020-2023

Tahun	Melahirkan Di Fasilitas Kesehatan	Melahirkan Dengan Bantuan Tenaga Kesehatan
(1)	(2)	(3)
2020	39,94	95,86
2021	43,47	93,53
2022	95,91	97,96
2023	94,97	99,08

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas

Pada tahun 2023, sebanyak 94,97 persen wanita usia 15-49 tahun yang pernah kawin melahirkan di fasilitas kesehatan. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 95,91 persen. Sementara itu, persentase perempuan usia 15-49 tahun pernah kawin di Konawe Selatan yang melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan pada tahun 2023 sebesar 99,08 persen.

Secara umum, besarnya persentase perempuan yang melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan dibandingkan dengan yang melahirkan di fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa kendatipun tidak melangsungkan proses persalinan di fasilitas kesehatan, beberapa dari mereka tetap memilih untuk menjalani proses persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan, sekalipun itu di rumah. Hal tersebut menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terutama ibu hamil akan keselamatan selama proses persalinan.

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Konawe Selatan yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Jalan, 2023

Jenis Kelamin	Pengguna Jaminan Kesehatan
(1)	(2)
Laki-laki	61,09
Perempuan	48,43
Laki-laki + Perempuan	53,52

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. BPJS Kesehatan adalah badan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan JKN. Pemanfaatan jaminan kesehatan tersebut menjadi indikator penting bagi pemerintah nasional maupun daerah untuk melihat sejauh mana kebijakan bantuan kesehatan yang disediakan bagi pemerintah mampu dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan Tabel 3.3, terlihat bahwa pada tahun 2023, persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan secara umum sebesar 53,52 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, persentase penggunaan jaminan kesehatan bagi penduduk laki-laki di Konawe Selatan lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk perempuannya. Persentase penduduk perempuan yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan hanya sebesar 48,43 persen. Sementara persentase penduduk laki-laki yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan adalah sebesar 61,09 persen.

Tabel 3.4. Jumlah Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk, 2019-2022

Tahun	Jumlah Puskesmas *	Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk
(1)	(2)	(3)
2019	24	2,31
2020	25	2,43
2021	25	2,40
2022	26	2,45

Catatan: *Termasuk puskesmas rawat inap dan non rawat inap yang sudah teregistrasi

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan Tabel 3.4 menunjukkan bahwa terjadi penambahan ketersediaan sarana puskesmas pada tahun 2022 di Konawe Selatan. Dengan demikian, jumlah puskesmas yang terdapat di Konawe Selatan pada tahun 2022 adalah sebanyak 26 unit yang tersebar di berbagai kecamatan di Konawe Selatan. Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk pada tahun 2022 sebesar 2,45 yang berarti rata-rata setiap 1 puskesmas melayani kurang lebih sebanyak 73.500 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus terus melakukan upaya memenuhi kebutuhan pelayanan medis masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang terdidik dan terlatih.

4 PENDIDIKAN

PENDAHULUAN



KEPENDUDUKAN



KESEHATAN



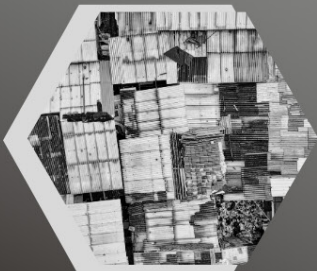
PENDIDIKAN



KETENAGAKERJAAN



TARAF DAN POLA
KONSUMSI



PERUMAHAN DAN
LINGKUNGAN



KEMISKINAN

PENUTUP

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan

suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, dan Rasio Murid Guru.

4.1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan Ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam.

Salah satu tujuan pembangunan pendidikan diantaranya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Hal ini dikarenakan masih

terbatasnya akses anak usia sekolah terhadap layanan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah. Dengan berbagai kebijakan tersebut diharapkan angka putus sekolah menurun. Dengan turunnya angka putus sekolah, secara tidak langsung berdampak pada semakin tingginya harapan lama sekolah bagi penduduk keterkaitan antara harapan lama sekolah, angka putus sekolah dan kondisi pendidikan saat ini. Gambarannya adalah sebagai berikut, jika kebijakan bidang pendidikan kondusif dan mendorong penduduk untuk tetap bersekolah, maka angka putus sekolah akan turun. Jika angka putus sekolah turun, berarti harapan lama sekolah naik. Walaupun mungkin kenaikan itu tidak langsung terlihat pada waktu yang bersamaan. Artinya, dampak terhadap harapan lama sekolah akan terlihat beberapa tahun kedepan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang tidak terjadi secara instan dan tiba-tiba.

Tabel 4.1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Konawe Selatan, 2020-2023

Tahun	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
(1)	(2)	(3)
2020	12,36	7,86
2021	12,37	8,11
2022	12,59	8,27
2023	12,78	8,51

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik IPM Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Pada tahun 2023, terjadi kenaikan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Konawe Selatan bila dibandingkan dengan tahun 2022. HLS naik dari 12,59 pada tahun 2022 menjadi 12,78 tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA. Kenaikan HLS ini menunjukkan perbaikan kondisi pendidikan di wilayah ini.

Ukuran lain mengenai pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-

rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

RLS di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2020 tercatat masih berada diangka 7,86 tahun. Kemudian, angka tersebut meningkat di tahun berikutnya menjadi 8,11 tahun dan 8,27 ditahun 2022. Hingga pada tahun 2023, angka rata-rata lama sekolah Konawe Selatan tercatat sebesar 8,51 tahun. Ini berarti pada tahun 2023, secara rata-rata penduduk Kabupaten Konawe Selatan usia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas 2). Meski naik, dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Konawe Selatan yang berusia 25 tahun ke atas putus sekolah saat berada di kelas 2 SMP.

Sesungguhnya, angka RLS mencerminkan kondisi pendidikan suatu wilayah beberapa tahun yang lalu, karena ini merupakan *outcome* dari proses pendidikan. Karena RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun keatas, artinya penduduk yang saat ini diperkirakan telah menyelesaikan proses pendidikannya. Sedangkan kondisi pendidikan saat ini akan berpengaruh pada angka HLS saat ini dan secara tidak langsung berpengaruh pada angka RLS beberapa tahun kedepan.

4.2. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Semakin tingginya status pendidikan yang dimiliki oleh seseorang diharapkan akan semakin meningkatkan keahlian dan keterampilannya. Dan dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator status pendidikan yang dimiliki juga

dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Pada tahun 2023 penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah bersekolah sama sekali sebanyak 5,46 persen, di mana mayoritas dari penduduk tersebut berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat lebih dalam lagi, sekitar 4,78 persen penduduk laki-laki berusia 5 tahun ke atas memiliki status pendidikan tidak atau belum pernah bersekolah. Sementara dari sisi penduduk perempuan, tercatat sekitar 6,15 persen penduduk perempuan yang berusia 5 tahun ke atas tercatat tidak atau belum pernah bersekolah.

Pada tahun 2023, penduduk laki-laki usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah dijenjang SD atau sederajat sebesar 13,86 persen, sedangkan untuk penduduk perempuannya sebesar 13,24 persen. Secara total, penduduk Konawe Selatan usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah di jenjang SD atau sederajat sebesar 13,55 persen, yang paling besar di antara jenjang lainnya.

Pada jenjang SMP atau sederajat, penduduk laki-laki di Konawe Selatan usia 5 tahun ke atas yang tercatat masih bersekolah di jenjang SMP atau sederajat pada tahun 2023 sebanyak 5,37 persen, sementara untuk penduduk perempuannya pada jenjang yang sama tercatat sebesar 4,66 persen. Secara umum, penduduk usia 5 tahun ke atas di Konawe Selatan pada tahun 2023 yang masih bersekolah di jenjang SMP atau sederajatnya sebesar 5,02 persen.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan, 2023

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum Pernah Bersekolah	4,78	6,15	5,46
Masih Sekolah di SD/Sederajat	13,86	13,24	13,55
Masih Sekolah di SMP/Sederajat	5,37	4,66	5,02
Masih Sekolah di SMA/Sederajat	6,33	9,29	7,80
Tidak bersekolah lagi	69,65	66,66	68,16

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas

Pada jenjang SMA ke atas, penduduk laki-laki di Konawe Selatan usia 5 tahun ke atas yang tercatat masih bersekolah di jenjang SMA ke atas pada tahun 2023 sebanyak 6,33 persen, sementara untuk penduduk perempuannya pada jenjang yang sama tercatat sebesar 9,29 persen. Secara umum, penduduk usia 5 tahun ke atas di Konawe Selatan pada tahun 2023 yang masih bersekolah di jenjang SMA ke atas sebesar 7,80 persen.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, secara umum pada tahun 2023 penduduk dengan jenis kelamin perempuan mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini tercermin dari persentase penduduk yang masih bersekolah di tiap-tiap jenjangnya di mana penduduk perempuan rata-rata memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, pada persentase penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah juga menunjukkan persentase penduduk laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk perempuan masih memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

4.3. Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS adalah rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama. APS untuk menilai pencapaian MDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Pada tahun 2023, Angka Partisipasi Sekolah untuk penduduk usia

7-12 tahun mencapai 99,60 persen atau dengan kata lain semua anak usia 7-12 tahun hampir semua sudah bersekolah. Sama halnya untuk penduduk dengan kelompok usia 13-15 tahun, pada tahun 2023 angka APS kelompok umur 13-15 tahun sebesar 99,73 persen. Sedangkan tahun 2023, terdapat sebesar 9,36 persen anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah. Meskipun demikian, APS kelompok usia 16-18 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, APS kelompok umur 16-18 tahun sebesar 68,77 persen, kemudian meningkat menjadi 90,64 persen pada tahun 2023. Peningkatan APS usia 16-18 tahun tersebut menunjukkan terjadinya penurunan jumlah anak putus sekolah pada kelompok umur 16-18 tahun.

Penduduk dengan kelompok usia 19-23 tahun, secara umum Angka Partisipasi Sekolah hanya terdapat 57,61 persen. Jika dilihat lebih dalam lagi, APS penduduk laki-laki lebih besar yaitu 65,32 persen. Sementara dari sisi penduduk perempuan, APS tercatat sekitar 51,35 persen. Artinya, penduduk perempuan pada kelompok umur 19-23 tahun tersebut menunjukkan banyak terjadinya putus sekolah.

Tabel 4.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin, 2023

Indikator Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
7 - 12 Tahun	99,22	100,00	99,60
13 - 15 Tahun	99,49	100,00	99,73
16 - 18 Tahun	90,28	90,99	90,64
19-23 Tahun	51,35	65,32	57,61
Angka Partisipasi Murni (APM)			
SD	99,22	100,00	99,60
SMP	87,53	91,78	89,52
SMA	75,37	69,92	72,56
Perguruan Tinggi	39,65	53,62	45,91

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas

Pada Tabel 4.3, menunjukkan terjadinya peningkatan APM pada jenjang pendidikan SMP hingga jenjang Perguruan Tinggi dalam 1 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan untuk anak-anak mereka pada jenjang SMP hingga Perguruan Tinggi. Secara umum APM jenjang SMP pada tahun 2022 tercatat sebesar 76,05 persen menjadi 89,52 persen pada tahun 2023 atau naik sebesar 13,47 poin. APM jenjang SMA mengalami peningkatan berhasil bertambah 12,61 poin dari 59,95 persen pada tahun 2022 menjadi 72,56 persen pada tahun 2023.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2023 APM pada tingkat pendidikan SD, SMP dan Perguruan Tinggi untuk perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Sedangkan, untuk APM pada tingkat Pendidikan SMA untuk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. APM jenjang SD untuk laki-laki tercatat sebesar 99,22 persen pada tahun 2023, sedangkan APM jenjang SD untuk perempuan sebesar 100,00 persen. Pada tingkat pendidikan SMP, APM laki-laki sebesar 87,53 persen, dibanding APM perempuan sebesar 91,78 persen pada tahun 2023. Pada jenjang pendidikan SMA, APM laki-laki tercatat sebesar 75,37 persen berbanding 69,92 persen APM perempuan.

4.4. Kualitas Pelayanan Pendidikan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain rasio murid-guru dan rasio murid-kelas.

Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani

oleh satu orang guru disuatu sekolah atau daerah tertentu. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan pedagogi, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar dan variasi di dalam kelas.

Selama kurun waktu tahun ajaran 2019/2020 hingga 2022/2023 rasio murid-guru menunjukkan angka yang cenderung turun, dimana pada tahun pelajaran 2019/2020 Rasio Murid-Guru SD hingga SMP tercatat sebesar 14. Sedangkan rasio Murid-Guru SMA sebesar 15. Di tahun ajaran 2022/2023 Rasio Murid-Guru SD tercatat sebesar 12, SMP sebesar 11 dan SMA tercatat sebesar 13.

Indikator berikutnya adalah rasio murid per sekolah. Rasio murid per sekolah adalah perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah sekolah di setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per sekolah digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan murid suatu sekolah di daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan murid semakin tinggi atau dapat dikatakan bahwa jumlah siswa yang ada di dalam sekolah tersebut tinggi. Tingginya rasio murid per sekolah juga akan memberikan dampak pada rendahnya efektivitas proses belajar mengajar.

Selama kurun waktu tahun ajaran 2019/2020 hingga 2022/2023 rasio murid-sekolah pada jenjang SD dan SMP menunjukkan angka yang cenderung turun. Pada periode pendidikan 2019/2020, rasio murid-sekolah pada jenjang pendidikan SD sebesar 113, kemudian terus menurun sampai pada periode 2022/2023 tercatat sebesar 108. Angka tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi penurunan beban murid setiap sekolah pada jenjang pendidikan SD. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP, rasio murid-sekolah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan penurunan jumlah murid pada setiap sekolah. Pada tahun pelajaran 2019/2020 rata-rata setiap sekolah mendidik 165 murid, kemudian terus menurun pada tahun pelajaran 2022/2023 menjadi 148, artinya setiap

sekolah mempunyai beban sebanyak 148 murid untuk dididik.

Penurunan rasio murid-sekolah juga terjadi pada jenjang pendidikan SMA dalam kurun waktu ajaran 2021/2022 hingga 2022/2023. Pada tahun pelajaran 2020/2021 terdapat sebanyak 269 murid SMA sederajat setiap sekolah menjadi sebanyak 248 murid pada tahun pelajaran 2021/2022. Kemudian angka tersebut kembali menurun menjadi 241 pada tahun ajaran 2022/2023. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas proses belajar mengajar ditingkatkan pendidikan baik SD, SMP dan SMA sederajat semakin membaik dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 4.4. Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Sekolah, 2021/2022 dan 2022/2023

Tahun Ajaran	Rasio Murid - Guru			Rasio Murid - Sekolah		
	SD ¹ /MI ²	SMP ¹ /MTs ²	SMA ¹ /MA ² / SMK ²	SD ¹ /MI ²	SMP ¹ /MTs ²	SMA ¹ /MA ² / SMK ¹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2018/2019	13	13	14	114	164	262
2019/2020	14	14	15	113	165	262
2020/2021	13	13	15	110	164	269
2021/2022 ¹	13	12	14	108	158	248
2022/2023	12	11	13	108	148	241

Catatan: ¹Angka diperbaiki

Sumber: ¹Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Data Semester Ganjil

²Kementerian Agama

5 KETENAGAKERJAAN

PENDAHULUAN



KEPENDUDUKAN



KESEHATAN



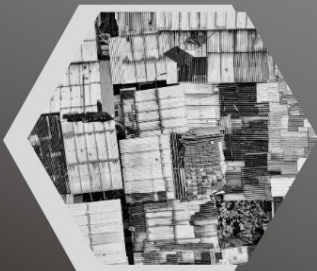
PENDIDIKAN



KETENAGAKERJAAN



TARAF DAN POLA
KONSUMSI



PERUMAHAN DAN
LINGKUNGAN



KEMISKINAN

PENUTUP

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha serta persentase pekerja menurut status pekerjaan.

5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur pencapaian hasil pembangunan. Selain itu TPAK juga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas).

Tabel 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2019 - 2023

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			
2019	89,59	52,65	71,59
2020	87,70	53,96	71,15
2021	87,80	55,73	71,98
2022	86,39	52,01	69,46
2023	85,77	53,19	69,93
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
2019	2,21	2,44	2,29
2020	2,96	1,94	2,58
2021	1,97	2,42	2,14
2022	2,53	3,68	2,95
2023	1,80	5,36	3,12

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus

TPAK pada kondisi bulan Agustus 2023 untuk penduduk laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,62 poin jika dibandingkan dengan kondisi yang sama pada tahun sebelumnya yaitu bulan Agustus 2022, sedangkan penduduk perempuan mengalami peningkatan sebesar 1,18 poin. TPAK secara umum mengalami peningkatan sebesar 0,47 poin, yaitu dari 69,46 persen pada Agustus 2022 menjadi 69,93 persen pada Agustus 2023. Peningkatan TPAK ini merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi.

Secara umum, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2023 menunjukkan peningkatan dibanding Agustus 2022. TPT Agustus 2022 tercatat sebesar 2,95 persen, meningkat menjadi 3,12 persen pada Agustus 2023. Peningkatan TPT ini mengindikasikan menurunnya penyerapan tenaga kerja bila dibanding tahun sebelumnya.

5.2. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Harapan setiap individu adalah mudah mendapatkan pekerjaan layak, sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada makin tinggi harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Tidak sedikit juga dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, sehingga sebagian dari mereka banyak yang menjadi pengangguran.

Tabel 5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2019 - 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tingkat Pendidikan Terbuka (TPT)				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	0,91	0,25	0,37	0,60	1,23
SMP	0,90	1,36	1,93	2,31	2,18
SMA	5,46	5,92	4,17	6,32	4,90
Perguruan Tinggi	1,72	3,49	2,84	2,34	5,06
Total	2,29	2,58	2,14	2,95	3,12

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus

Berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, terlihat bahwa TPT tertinggi tahun 2023 tercatat pada jenjang pendidikan perguruan tinggi (3,12 persen), kemudian diikuti oleh jenjang SMA (4,90 persen), dan jenjang SMP (2,18 persen) dan SD (1,23 persen). Tingginya TPT penduduk dengan jenjang pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi tersebut mengindikasikan bahwa lapangan kerja yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan masih harus ditingkatkan, terutama untuk menyerap penduduk dengan tingkat

pendidikan SMA keatas. Selain itu, pemerintah masih harus mendorong menciptakan lapangan pekerjaan baru karena masih banyak setengah pengangguran yang masih bekerja paruh waktu. Kondisi mereka ini rentan jika terjadi guncangan ekonomi, bisa terdorong ke kategori pengangguran terbuka.

5.3. Lapangan Usaha

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran maupun penduduk yang bekerja, sangat erat kaitannya dengan kinerja sektor-sektor perekonomian atau lapangan usaha di suatu wilayah. Jumlah penduduk yang bekerja menunjukkan kemampuan lapangan usaha ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, tingginya angka pengangguran menunjukkan ketidakmampuan sektor-sektor ekonomi menyerap tenaga kerja yang ada di wilayah tersebut.

Tabel 5.3. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama, 2022 dan 2023

Lapangan Usaha	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	36 524	39 343	18 687	19 565	55 211	58 908
Industri pengolahan, Pertambangan dan Pengalihan, dan industry lainnya	31 267	29 734	9 730	6 781	40 997	36 515
Jasa	32 433	33 235	29 429	31 462	61 862	64 697
Total	100 224	102 312	57 846	57 808	158 070	160 120

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus

Secara umum penduduk Kabupaten Konawe Selatan pada Agustus 2023 lebih banyak bekerja pada lapangan usaha Sektor Jasa. Lapangan usaha tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 64.697 orang atau sekitar

40,40 persen dari seluruh penduduk 15 tahun keatas yang bekerja. Lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar kedua adalah sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan yakni sebanyak 58.908 orang atau sekitar 36,79 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki di Kabupaten Konawe Selatan usia 15 tahun ke atas lebih banyak yang bekerja daripada penduduk perempuannya di setiap kategori lapangan usaha. Dimana pada lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan, sebesar 66,79 persen penduduk laki-laki yang bekerja dari total penduduk yang bekerja pada lapangan usaha tersebut. Kemudian, dari 36.515 penduduk usia 15 tahu ke atas yang berkerja pada lapangan usaha Industri pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, dan industri lainnya, sekitar 81,43 persen adalah penduduk laki-laki. Sementara, penduduk laki-laki yang bekerja pada lapangan usaha sektor jasa, sebanyak 33.235 orang atau sebesar 51,37 persen.

5.4. Status Pekerjaan

Status pekerjaan didefinisikan sebagai jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Status pekerjaan juga dapat berkaitan dengan besarnya penghasilan yang diterima oleh pekerja.

Secara umum, penduduk Kabupaten Konawe Selatan usia 15 tahun ke atas bekerja dengan status sebagai buruh/karyawan/pegawai. Tahun 2023 tercatat sebanyak 26,81 persen penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. Angka tersebut lebih didominasi oleh penduduk laki-laki, dimana penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai sebesar 28,97 persen dari total penduduk laki-laki yang bekerja. Sementara, penduduk perempuan usia 15 tahun keatas yang berstatus buruh/karyawan/pegawai tercatat hanya sebanyak 22,97 persen dari total penduduk perempuan yang bekerja.

Tabel 5.4. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2023

Status Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	23,32	27,21	24,72
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak	24,32	11,34	19,63
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	5,27	0,69	3,62
Buruh/karyawan/pegawai	28,97	22,97	26,81
Pekerja bebas di pertanian dan non pertanian	9,59	2,31	6,96
Pekerja keluarga/tidak dibayar	8,53	35,48	18,26

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus

Jika dilihat lagi dari jenis kelamin penduduk, secara umum pada tahun 2023 penduduk laki-laki lebih banyak bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pada tahun 2023, penduduk laki-laki tercatat sebanyak 28,97 persen, sedangkan penduduk perempuan tercatat sebesar 22,97 persen. Sebaliknya untuk perempuan justru lebih banyak yang berstatus sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Pada tahun 2023, penduduk perempuan yang berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar ada sebanyak 35,48 persen, sedangkan penduduk laki-laki hanya sebesar 8,53 persen.

6 TARAF DAN POLA KONSUMSI

PENDAHULUAN



KEPENDUDUKAN



KESEHATAN



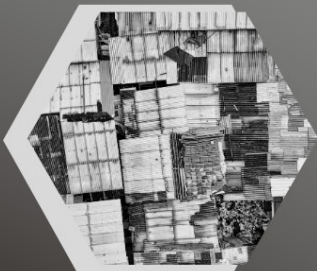
PENDIDIKAN



KETENAGAKERJAAN



TARAF DAN POLA
KONSUMSI



PERUMAHAN DAN
LINGKUNGAN



KEMISKINAN

PENUTUP

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/ keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

6.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan, di mana pengeluaran bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama, dan pengeluaran untuk barang-barang lainnya selain dari pengeluaran untuk makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Selama periode 2022-2023 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk mengalami peningkatan dari Rp1.036.823 menjadi Rp1.096.657.

Bila dilihat dari proporsi pengeluaran penduduk, persentase pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan dari 49,48 persen pada tahun 2022 menjadi 46,70 persen pada tahun 2023. Sebaliknya, proporsi pengeluaran bukan makanan meningkat dari 50,52 persen menjadi 53,30 persen.

Secara umum, rata-rata pengeluaran untuk makanan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,17 persen dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp513.005 menjadi Rp512.146 perkapita sebulan. Sementara pada pengeluaran bukan makanan, meningkat sebesar 11,59 persen dari Rp523.818 pada tahun 2022 menjadi Rp584.511 perkapita sebulan pada tahun 2023.

Tabel 6.1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2023

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase (%)	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	513 005	512 146	49,48	46,70
Non Makanan	523 818	584 511	50,52	53,30
Total Pengeluaran	1 036 823	1 096 657	100,00	100,00

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas Maret 2022 dan 2023

Pada pengelompokan distribusi pengeluaran, rumah tangga dibagi menjadi tiga kelompok yang tidak sama besar. Hal ini bertujuan untuk melihat kemampuan masyarakat dalam pola pengeluaran sehari-hari. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata pengeluaran makanan masyarakat dengan pengeluaran 40 persen bawah adalah sebesar Rp291.098,- dan nonmakanan sebesar Rp173.776,-. Nilai tersebut akan terlihat jauh berbeda jika kita membandingkan dengan pengeluaran kelompok masyarakat yang berada pada kelompok 20% atas.

Tabel 6.2. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan Menurut Kuintil Pengeluaran (Rupiah), 2023

Kuintil Pengeluaran	Makanan	Non Makanan	Total Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
40% Bawah	311 071	220 894	531 965
40% Tengah	532 255	439 598	971 853
20% Tinggi	873 117	1 598 697	2 471 814
Rata-rata	512 146	584 511	1 096 657

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas Maret 2023

Selain itu, kita juga dapat melihat pola pengeluaran yang berbeda antara 3 kelompok masyarakat tersebut. Pada kelompok masyarakat 40% bawah dan 40% tengah cenderung memiliki pengeluaran makanan yang lebih besar dibandingkan dengan non makanannya. Namun pada kelompok masyarakat 20% atas justru pengeluaran nonmakanan memiliki porsi lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran makanannya.

6.2. Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2015 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2014), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Tabel 6.3. Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari menurut Kuintil Pengeluaran, 2023

Kuintil Pengeluaran	Kalori (kkal/kapita/hari)	Protein (gram/kapita/hari)
(1)	(2)	(3)
40% Bawah	1 747,41	50,81
40% Tengah	2 167,82	65,34
20% Tinggi	2 375,84	76,97
Rata-rata	2 041,42	61,86

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas Maret 2023

Rata-rata konsumsi kalori penduduk pada tahun 2023 sebanyak 1.747,41 kkal/hari untuk kelompok masyarakat 40% bawah, 2.167,82 kkal/hari untuk kelompok masyarakat 40% tengah, dan 2.375,84 kkal/hari untuk 20% atas. Hal ini berarti konsumsi kalori per hari penduduk tahun 2023 untuk 40% persen kelompok pengeluaran bawah belum memenuhi syarat kecukupan gizi berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi untuk kategori kecukupan energi. Kelompok masyarakat 40% tengah dan 20% atas saja yang telah mampu memenuhi kebutuhan kalori perkapita per hari. Dalam hal konsumsi protein, rata-rata masyarakat Konawe Selatan mengonsumsi 61,86 gram per kapita per hari. Dengan demikian, jumlah protein yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Konawe Selatan secara umum telah mampu memenuhi ketentuan atau batas kecukupan gizi yang direkomendasikan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi.

7 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

PENDAHULUAN



KEPENDUDUKAN



KESEHATAN



PENDIDIKAN



KETENAGAKERJAAN



TARAF DAN POLA KONSUMSI



PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN



KEMISKINAN

PENUTUP

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

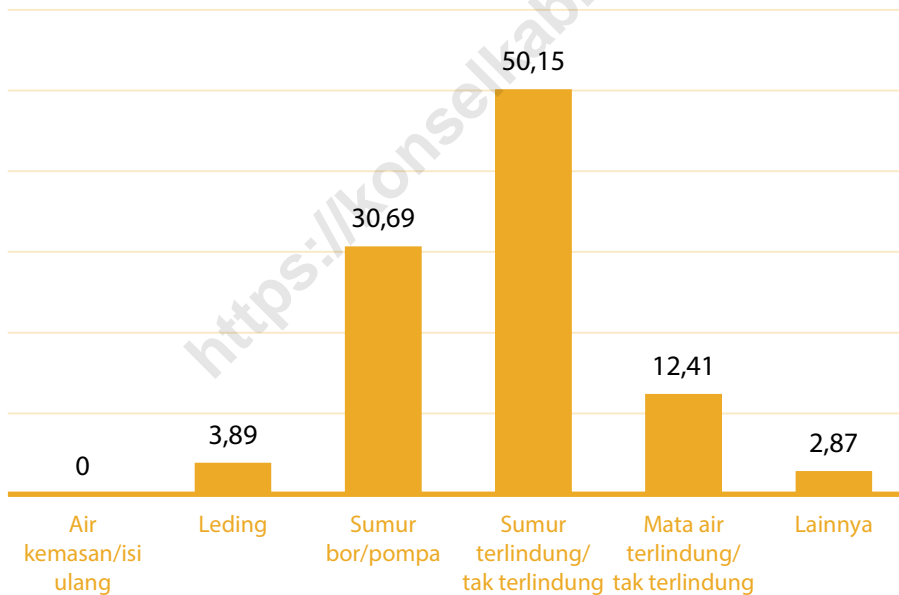
Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas, sumber air minum, sumber air utama untuk keperluan sehari-hari, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

7.1. Sumber Air Pada Rumah Tangga

Salah satu Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat adalah sumber air utama yang digunakan untuk mandi, memasak, mencuci, dan lain-lain. Pada tahun 2023, mayoritas masyarakat Konawe Selatan memanfaatkan

sumur terlindung atau sumur tak terlindung untuk keperluan sehari-hari. Pada tahun 2023, sebanyak 50,15 persen rumah tangga di Konawe Selatan memanfaatkan sumur terlindung/tak terlindung untuk keperluan sehari-hari. Kemudian sebanyak 30,69 persen rumah tangga yang menggunakan sumur bor/pompa dan sebanyak 12,41 persen rumah tangga yang menggunakan mata air terlindung/ tak terlindung. Sementara yang menggunakan leding dan sumber air lainnya masing-masing tercatat hanya sebanyak 3,89 persen rumah tangga yang menggunakan leding dan 2,87 persen menggunakan sumber air lainnya (sungai, danau, waduk, irigasi,dll).

Gambar 7.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Untuk Keperluan Sehari-hari, 2023



Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas

7.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas dalam menunjang kebersihan dan sanitasi yang baik dalam suatu rumah tinggal. Sanitasi yang baik merupakan faktor utama yang mendukung bagi kesehatan masyarakat yang tinggal dalam suatu lingkungan. Kelayakan

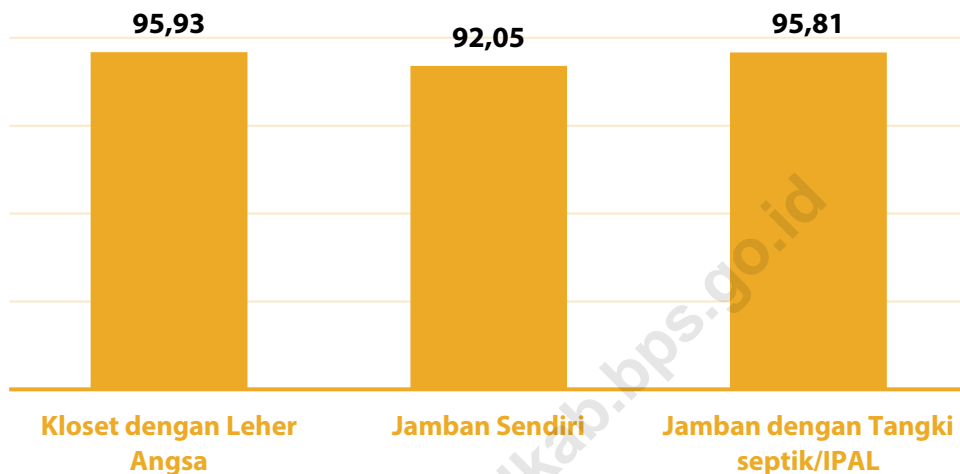
sanitasi tersebut dapat dilihat dari jenis kloset yang digunakan, penggunaan jamban milik sendiri, hingga ketersediaan tangki septik sebagai tempat penampungan akhir kotoran.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri maupun jamban yang sudah memiliki tangki septik. Pada tahun 2023, rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri sebanyak 92,05 persen, sisanya sebanyak 10,80 persen masih menggunakan fasilitas bersama, MCK umum, dan tidak ada/tidak menggunakan fasilitas buang iar besar.

Sistem pembuangan dengan jenis leher angsa bertujuan agar kotoran tidak langsung jatuh ke lubang penampungan kotoran. Hal ini secara tak langsung menghalangi mikroba dan bakteri yang keluar dari kotoran. Selain itu, penggunaan kloset leher angsa juga agar bakteri yang ada pada septic tank tidak keluar dan mencemari toilet. Pada tahun 2023, rumah tangga di Kabupaten Konawe Selatan yang telah memiliki kloset dengan jenis leher angsa mencapai 95,93 persen.

Sementara itu, kondisi berbeda justru terjadi pada persentase rumah tangga yang menguasai kepemilikan jamban dengan tangki septik, SPAL. Pada tahun 2023, sebanyak 95,81 persen rumah tangga di Konawe Selatan telah memiliki jamban dengan tangki septik, SPAL di rumahnya. Angka tersebut meningkat cukup tinggi, di mana pada tahun 2021 hanya terdapat 84,26 persen rumah tangga yang memiliki jamban dengan tangki septik, SPAL di rumahnya. Peningkatan kepemilikan jamban dengan adanya tangki septik ini mengindikasikan bahwa masyarakat Konawe Selatan semakin peduli mengenai sanitasi dan kesehatan lingkungannya.

Gambar 7.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2023



Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas

7.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat

Berdasarkan hasil Susenas 2023, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 97,11 persen. Sisanya, sebanyak 2,89 persen rumah tangga menempati rumah bukan milik sendiri yang terdiri dari kontrak/sewa, bebas sewa/rumah dinas/lainnya. Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri tahun 2023 tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana pada tahun 2022 hanya terdapat 96,13 persen rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri.

Tabel 7.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2022-2023

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	96,13	97,11
Bukan Milik Sendiri	3,87	2,89

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas

<https://konselkab.bps.go.id>

8 KEMISKINAN

PENDAHULUAN



KEPENDUDUKAN



KESEHATAN



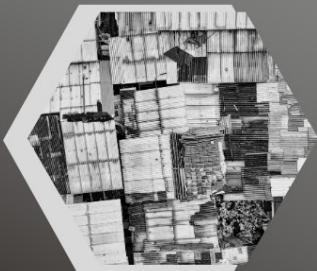
PENDIDIKAN



KETENAGAKERJAAN



TARAF DAN POLA
KONSUMSI



PERUMAHAN DAN
LINGKUNGAN



KEMISKINAN

PENUTUP

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap wilayah, termasuk Sulawesi Tenggara. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs yang pertama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah, maupun dari lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

8.1. Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2019-2023. Tahun 2019, jumlah penduduk miskin sebanyak 33,89 ribu jiwa atau 10,81 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Konawe Selatan. Hingga tahun 2023 jumlah penduduk miskin sebanyak 36,84 ribu jiwa atau selama lima tahun terakhir bertambah sebesar 2,95 ribu jiwa.

Tabel 8.1. Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Konawe Selatan, 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
2019	33,89	10,81
2020	34,22	10,74
2021	36,17	11,34
2022	35,79	11,08
2023	36,84	11,26

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas

8.2. Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Konawe Selatan mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2018-2022. Garis kemiskinan Kabupaten Konawe Selatan tahun 2018 tercatat sebesar Rp219.979 per kapita per bulan dan terus meningkat hingga Rp294.510 per kapita per bulan pada tahun 2022. Selama lima tahun terakhir garis kemiskinan di Konawe Selatan telah meningkat sebesar 33,88 persen. Catatan kondisi rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang cenderung makin menjauhi garis kemiskinan, disertai ketimpangan pengeluaran penduduk miskin yang juga semakin melebar, hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan ketimpangan pendapatan lebih kepada kelompok penduduk tidak miskin. Sementara, kelompok penduduk miskin masih menerima pendapatan yang cukup rendah sehingga tidak mampu mengangkat taraf ekonominya. Di saat yang sama, besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan juga mengalami peningkatan.

Tabel 8.2. Garis Kemiskinan(Rp/Kapita/Bulan), 2018-2022

Tahun	Garis Kemiskinan
(1)	(2)
2018	219 979
2019	235 654
2020	261 382
2021	275 339
2022	294 510

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas

<https://konselkab.bps.go.id>

9 PENUTUP

PENDAHULUAN



KEPENDUDUKAN



KESEHATAN



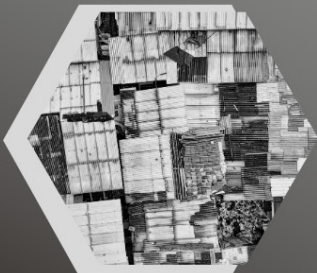
PENDIDIKAN



KETENAGAKERJAAN



TARAF DAN POLA
KONSUMSI



PERUMAHAN DAN
LINGKUNGAN



KEMISKINAN

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan kesejahteraan rakyat suatu wilayah tentunya tidak hanya dicapai oleh satu atau dua tahun pembangunan, namun proses tersebut memerlukan rentang waktu yang lebih panjang dan berkesinambungan. Seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya telah banyak kemajuan di bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan dan perumahan serta bidang lainnya.

BPS yang secara rutin melakukan berbagai kegiatan survei seperti SUSENAS dan SAKERNAS. Dalam bab ini akan disampaikan kembali mengenai kemiskinan dan ketenagakerjaan.

Penduduk miskin sangat rentan, dapat jatuh ke bawah garis kemiskinan atau naik melampaui garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Apabila pertumbuhan ekonomi membaik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka proyek-proyek berjalan dengan lancar dan mereka dapat memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Tetapi apabila ekonomi memburuk dan proyek-proyek tidak berjalan atau terlambat dijalankan maka sebagian dari mereka bisa menjadi tidak bekerja dan menjadi miskin.

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Selatan pada Maret 2023 yaitu sebesar 36,84 ribu jiwa, meningkat dibanding Jumlah Penduduk Miskin pada Maret 2022 yang sebanyak 35.79 ribu jiwa. Meningkatnya penduduk miskin pada periode ini diikuti juga dengan meningkatnya Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,17 poin. Pada tahun 2022, TPT Kabupaten Konawe Selatan sebesar 2,95 persen dan meningkat menjadi 3,12 persen pada tahun 2023. Peningkatan TPT ini mengindikasikan menurunnya penyerapan tenaga kerja bila dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, meningkatnya penduduk miskin ini disebabkan karena turunnya daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh naiknya harga barang dan jasa. Untuk menjaga stabilitas konsumsi masyarakat khususnya pada rumah tangga miskin, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan mengadakan kegiatan dalam bentuk operasi pasar murah (OPM).

<https://konselkab.bps.go.id>

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KONAWA SELATAN**

Jl. Poros 60 Andoolo, Konawe Selatan
Telp. (0401) 308-8520; Email: bps7405@bps.go.id
Website: <https://konselkab.bps.go.id>